

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan terdiri dari berbagai pulau serta daerah. Dengan wilayah negara yang cukup luas ini, Indonesia memiliki sistem penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri. Urusan pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat diselenggarakan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pemerintah daerah, diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Penggantian ini disebabkan oleh permasalahan dan kondisi urusan pemerintahan di Indonesia yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga peraturan sebelumnya dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan serta penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia saat ini.

Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat daerah setempat, atau dapat

disebut juga dengan otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah tentunya diperlukan dana dan biaya yang tidak sedikit. Dana ini berasal dari penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah atau pembiayaan. Sehingga setiap pemerintah daerah berusaha mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai segala pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah setempat.

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Dari empat sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah umumnya memiliki porsi kontribusi lebih besar terhadap PAD dan diharapkan dapat dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Sementara itu sejak akhir 2019, seluruh dunia tengah diramaikan dengan adanya wabah virus yaitu *Coronavirus Disease-19* atau yang biasa disebut Covid-19. Kemunculan dan penyebaran virus covid-19 membuat banyak negara termasuk Indonesia merasakan dampaknya di berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan hingga perekonomian. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan penanganan covid-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga program vaksinasi secara menyeluruh.

Selain kebijakan umum, upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi covid-19 salah satunya dengan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Peraturan ini membahas mengenai penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), evaluasi rancangan perda mengenai pajak dan retribusi, pengawasan perda mengenai pajak dan retribusi, dukungan insentif pelaksanaan perizinan berusaha serta sanksi administratif. Dengan diterbitkannya peraturan ini, diharapkan mampu membantu memulihkan perekonomian dengan meningkatkan pendapatan asli daerah setempat.

Dilansir dari artikel berita *abdipersadafm*, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp1,687 triliun lebih atau 103,57 persen dari target Rp1,6 triliun. Ia juga menambahkan bahwa penerimaan tersebut salah satunya berasal dari PAD yang terealisasi sebesar Rp297 miliar atau 109,04 persen dari target Rp271 miliar. Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin membuktikan bahwa mereka berhasil melampaui target realisasi penerimaan daerah walaupun tengah menghadapi pandemi covid-19. Meskipun sumber pajak daerah terutama sektor pajak hotel dan hiburan mengalami penurunan akibat dari kebijakan PPKM di masa

pandemi covid-19, Pemerintah Kota Banjarmasin mampu mengoptimalkan pendapatan daerah di sejumlah sektor lainnya seperti retribusi daerah sehingga mampu menutupi adanya penurunan tersebut. Bahkan Pemerintah Kota Banjarmasin mampu menjadi salah satu kabupaten/kota dengan PAD tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Banjarmasin dan membahas hal tersebut dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PADA MASA PANDEMI COVID-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan latar belakang tersebut antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana klasifikasi dan jenis retribusi daerah Pemerintah Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pendapatan retribusi daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Banjarmasin?

4. Bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap retribusi daerah Pemerintah Kota Banjarmasin?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dengan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui klasifikasi dan jenis retribusi daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pendapatan retribusi daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap retribusi daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu hanya mengenai pendapatan asli daerah pada sektor retribusi daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin saat sebelum pandemi covid-19 dan selama pandemi covid-19. Pembahasan ini akan berfokus pada klasifikasi dan jenis retribusi daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, penerapan akuntansi pendapatan retribusi daerah di lapangan dan membandingkannya dengan teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan, kontribusi, dan efektivitas retribusi atas

pendapatan asli daerah serta pengaruh pandemi covid-19 terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Laporan Keuangan Audited Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 dan 2020 serta Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan yang digunakan sebagai sumber data adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Melalui penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, diharapkan mampu memberikan informasi mengenai klasifikasi dan jenis retribusi daerah serta penerapan akuntansinya pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Selain itu, juga dapat mengetahui bagaimana kontribusi dan efektivitas serta dampak pandemi covid-19 atas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penulisan karya tulis ini, diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman analisis mengenai penerapan akuntansi pendapatan retribusi daerah yang telah dipelajari dengan kondisi di lapangan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dengan penulisan karya tulis ini, dapat dijadikan sebagai informasi mengenai bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah setempat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pemerintah terkait retribusi daerah, sehingga pemerintah mampu mengoptimalkan penerimaan daerah di tengah masa pandemi covid-19 dalam rangka memulihkan perekonomian.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai pokok bahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang memuat uraian mengenai latar belakang disertai dengan rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Selain itu, bab ini juga memuat penjelasan mengenai ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat kerangka teori yang digunakan penulis sebagai landasan dalam penyusunan karya tulis, baik yang bersifat umum, maupun khusus. Adapun sumber teori yang digunakan antara lain adalah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah setempat dan sumber lainnya yang relevan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan dan memperoleh data sesuai topik yang dibahas. Selain itu, bab ini juga memuat pembahasan dari data yang dikumpulkan penulis seperti gambaran objek penulisan yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin, pendapatan asli daerah, hingga analisis penulis mengenai bagaimana kontribusi dan efektivitas retribusi daerah didalamnya baik pada masa pandemi covid-19 maupun sebelum pandemi covid-19 beserta dampak terhadap retribusi daerah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan dan hasil analisis yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Banjarmasin pada masa pandemi covid-19 maupun sebelum pandemi covid-19. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penulisan dalam karya tulis tugas akhir ini.